

**ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2021**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RIFDA NABILLA SURIA**

**NIM: G91219094**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN

Saya, Rifda Nabilla Suria, G91219094, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 18 Juli 2023



Rifda Nabilla Suria  
NIM.G91219094

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Surabaya, 19 Januari 2023

### **ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEABALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2021**

Diajukan oleh:

**RIFDA NABILLA SURIA  
NIM: G91219094**

**Skripsi telah selesai dan siap diuji**

**Dosen Pembimbing**



Hapsari Wiji Utami, M.S.E.  
NIP. 198603082019032012

## LEMBAR PENGESAHAN

# ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEBALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2021



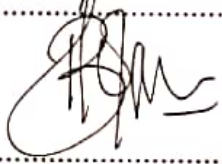
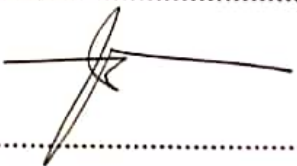
Oleh  
Rifda Nabilla Suria  
NIM : G91219094

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
tanggal 03 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat  
untuk diterima

### Susunan Dewan Penguji:

1. Hapsari Wiji Utami, M.S.E.  
NIP. 198603082019032012  
(Penguji 1)
2. Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I  
NIP. 197008042005011003  
(Penguji 2)
3. Betty Silfia Ayu Utami, S.E., M.S.E.  
NIP. 198706102019032019  
(Penguji 3)
4. Debby Nindya Istiandari, M.E.  
NIP. 199512142022032002  
(Penguji 4)

### Tanda Tangan

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Surabaya, 18 Juli 2023  
Dekan  
  
Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP. 19700514200031001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifda Nabilla Suria  
NIM : G91219094  
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ilmu Ekonomi  
E-mail address : rifdanabilla12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISI PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAREAH PROVINSI

JAWA TIMUR TAHUN 2012-2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 November 2023

Penulis

( Rifda Nabilla Suria )

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang terbagi menjadi 37 provinsi, dalam menjangkau layanan dan penataan di daerah pemerintah menggunakan strategi kebijakan desentralisasi fiskal yaitu merupakan bentuk dari pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi sumber penghasilan tertinggi adalah PKB dan BBNKB, hal ini dikarenakan jenis pajak tersebut memiliki peran yang sangat esensial pada pendapatan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan model Analisis Regresi Linier dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.

Hasil dari penelitian menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda menunjukan bahwa nilai uji F sebesar  $0,000 < 0,05$  maka bisa diartikan bahwa PKB dan BBNKB berpengaruh secara simultan terhadap variabel PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021. Selain itu dari hasil analisis secara parsial menunjukan pada Uji T variabel Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai  $0,000 < 0,05$  maka bisa disimpulkan bahwa variabel PKB berpengaruh secara parsial terhadap PAD ah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021, sedangkan Variabel BBNKB pada Uji T memiliki nilai  $0,142 > 0,05$  maka bisa disimpulkan bahwa variabel BBNKB tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 95,4% yang artinya adanya pengaruh sebesar 95,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Selain itu hasil dari perhitungan kontribusi PKB mencapai 34% sedangkan pada BBNKB mencapai 24% , nilai ini cukup besar terhadap PAD dan juga cukup dalam pembiayaan pemerintah.

Penelitian ini menyarankan pada Samsat Provinsi Jawa Timur melakukan upaya intensifikasi pajak yang merujuk pada upaya peningkatan penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak.

**Kata Kunci:** Pengaruh, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor, Pendapatan Asli Daerah

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country that is divided into 37 provinces, in reaching services and arrangements in the regions the government uses a fiscal decentralization policy strategy, which is a form of delegation of central government affairs to regional governments. One of the highest sources of income is PKB and BBNKB, this is because these types of taxes have a very essential role in regional income.*

*This research uses descriptive quantitative methods with the Linear Regression Analysis model using the SPSS 21 application.*

*The results of the study using the Multiple Linear Regression Analysis method show that the F test value is  $0.000 < 0.05$ , which means that PKB and BBNKB have a simultaneous effect on the PAD variable in East Java Province in 2012-2021. In addition, from the results of the partial analysis, it shows that the T-test for the Motor Vehicle Tax variable has a value of  $0.000 < 0.05$ , so it can be concluded that the PKB variable has a partial effect on PAD'ah of East Java Province in 2012-2021, while the BBNKB variable on the T-test has a value  $0.142 > 0.05$ , it can be concluded that the BBNKB variable has no partial effect on the PAD of East Java Province in 2012-2021 with an Adjusted R Square value of 95.4%, which means that there is an influence of the remaining 95.4% influenced by other variables. In addition, the results of calculating the contribution of PKB reached 34% while for BBNKB it reached 24%, this value is quite large for PAD and is also sufficient for government financing.*

*This study suggests that Samsat in East Java Province make tax intensification efforts which refer to efforts to increase tax revenues by expanding the tax base.*

**Keywords:** *Influence, Motor Vehicle Tax, Transfer Fee of Motor Vehicles, Regional Original Revenue*

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
<i>DECLARATION</i> .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
2.1. Landasan Teori .....	16
2.1.1. Pajak Daerah.....	16
2.2.1. Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
2.3.1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	24
2.4.1. Pendapatan Asli Daerah .....	27
2.2. Penelitian Terdahulu .....	30
2.3. Kerangka Konseptual.....	37
2.3.1 Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Tempat Penelitian .....	41
3.3. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel.....	42
3.4. Jenis dan Sumber data .....	43
3.5. Teknik Analisis Data.....	45



3.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
3.5.2. Asumsi Klasik.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
<b>4.1. Analisis Data.....</b>	<b>70</b>
4.1.1. Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda .....	70
4.1.2. Pengujian Asumsi Klasik.....	73
4.1.3. Penentuan Hipotesis .....	77
<b>4.2. Pembahasan.....</b>	<b>80</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>88</b>
<b>5.2. Saran .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB VI BIODATA PENELITI.....</b>	<b>90</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi Jawa Timur dan Jenis Kendaraan (unit) .....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 4. 1 Realisasi PAD Jawa Timur 2012-2021 .....	70
Tabel 4. 2 Realisasi PKB dan BBNKB 2012-2021 .....	71
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	72
Tabel 4. 4 Uji Normalitas.....	74
Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas .....	75
Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi.....	76
Tabel 4. 7 RunsTest .....	77
Tabel 4. 8 Analisis Regresi Linier Berganda .....	77
Tabel 4. 9 Uji F (Simultan) .....	78
Tabel 4. 10 Uji T (Hipotesis) .....	79
Tabel 4. 11 Koefisien Determinan .....	80
Tabel 4. 12 Perhitungan kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur ....	84
Tabel 4. 13 Perhitungan kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur .....	85

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 4. 1 Uji Normalitas.....	73
Gambar 4. 2 Uji Normalitas.....	74
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas.....	76



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi Jawa Timur dan Jenis Kendaraan (unit) .....	76
Lampiran 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2012-2021 (Triliun Rupiah) .....	77
Lampiran 3 Data Target dan Realisasi PKB dan BBNKB (Triliun Rupiah) .....	79
Lampiran 4 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	80
Lampiran 5 Uji Multikolinieritas .....	81
Lampiran 6 Uji Autokorelasi .....	82
Lampiran 7 Uji Autokorelasi menggunakan Runs Test.....	83
Lampiran 8 Analisis Regresi Linier Berganda.....	84
Lampiran 9 Uji F (Simultan).....	85
Lampiran 10 Uji T (Parsial).....	86
Lampiran 11 Koefisien determinan .....	87
Lampiran 12 Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 (Triliun Rupiah) .....	88
Lampiran 13 Perhitungan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 (Triliun Rupiah).....	89

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi beberapa daerah dan provinsi. Dilansir dari web (kompas.com) Indonesia terbagi menjadi 37 provinsi yang semua jenis pelayanan dan penataannya dilimpahkan kepada pemerintah pusat. Namun seiring berjalannya waktu dalam menjangkau layanan dan penataan di daerah, pemerintah pusat mengalami kesulitan, salah satunya pemberian layanan pada daerah yang termasuk ke dalam kategori daerah pelosok. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia mulai menggunakan strategi baru yang sesuai dengan Undang-undang No 22 dan 25 Tahun 1999 yaitu mengenai kebijakan desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Hastuti, 2018) Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan bentuk dari pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didasari dengan asas otonomi.

Dalam pelimpahan tugas pokok dan fungsi pemerintahan ini, pemerintah daerah dipaksa untuk dapat memperoleh pendapatan sendiri guna untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan keuangan daerah, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki di tiap daerahnya masing-masing. (Mahmudi, 2016) menjelaskan bahwa pendapatan

daerah lebih efektif dan stabil dibandingkan sektor usaha, karena sektor usaha yang tidak terikat mengakibatkan sangat mudah dipengaruhi pasar yang tentunya mengakibatkan sektor usaha ini bermacam-macam jenisnya. Oleh sebab itu guna meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah setempat harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peraturan per Undang-undangan, termasuk pada pajak dan retribusi daerah.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta “ Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, saat ini kedua jenis pemerintahan tersebut memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan pemerintahan daerah. Otonomi daerah bersifat luas, murni, dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki arti penting yang lebih besar dalam kerangka keuangan daerah ketika otoritas keuangan daerah tumbuh, begitu pula sebaliknya. Adanya otonomi daerah mempengaruhi pembentukan kewenangan dan tugas tambahan bagi daerah untuk menyelenggarakan beragam penyelenggaraan pemerintahan. Pengalihan, pendistribusian, dan pemanfaatan SDA dan SDM, serta kemampuan memungut pajak daerah, semuanya didasarkan pada konsep ketidakberpihakan yang berlaku di setiap daerah. Semakin besar pendapatan suatu daerah, maka semakin besar pula fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah memberikan banyak perubahan, yang dulunya daerah tidak aktif, kini aktif dalam memperjuangkan daerahnya. Dalam pemerintahan sendiri saat ini, sumber keuangan daerah meliputi pendapatan dan pembiayaan daerah. Akibatnya, daerah bersaing untuk meningkatkan aliran pendapatan dengan mengenakan berbagai pajak dalam lingkup daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak dalam rangka mendukung kinerja dan kegiatan daerah, pendapatan daerah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu penerimaan daerah terdiri dari semua penerimaan kas yang diterima melalui kas umum daerah, yang berperan dalam penyertaan modal dan merupakan hak daerah yang wajib diganti oleh daerah dalam waktu satu tahun anggaran. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Menurut (Utami, 2014) pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian uang atau kekayaan seseorang kepada kas negara untuk memenuhi kebutuhan negara dan rakyat.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 tentang Jenis-Jenis Pajak Yang Dikenakan pajak terdiri atas dua jenis; a) pajak provinsi dan b) pajak Kabupaten/Kota.

Menurut (Pantow, J. & Walewangko, E, 2019) sebagai sumber pendapatan daerah, pajak daerah sangat perlu dalam membiayai kegiatan daerah, termasuk urusan pemerintahan umum dan pembangunan. Hal ini penting karena otonomi daerah tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pendapatan asli daerah. Akibatnya, pemerintah daerah harus menjalin kemitraan jangka panjang untuk menambah pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah. Selanjutnya, pembangunan daerah merupakan unsur penting dalam perkembangan nasional karena pada intinya merupakan upaya yang disengaja guna memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kompetensi yang efektif dan profesional dalam melayani masyarakat. Terlebih merupakan unsur untuk mengupayakan sumber daya ekonomi yang memberikan partisipasi bagi pendapatan daerah, yang selanjutnya dimanfaatkan guna mendukung tujuan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dari banyaknya jenis pajak daerah, salah satu yang menjadi sumber penghasilan tertinggi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini dikarenakan jenis pajak tersebut memiliki peran yang sangat esensial pada pendapatan daerah.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi Jawa Timur dan Jenis Kendaraan (unit)**

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Total
2012	1,109,802	28,722	636,913	12,957,457	14,732,894
2013	1,290,866	29,154	638,498	13,326,754	15,285,272
2014	1,355,398	28,774	640,905	14,124,875	16,149,952
2015	1,450,876	29,550	642,890	15,076,168	17,199,484
2016	1,542,941	30,285	644,795	16,190,169	18,408,190
2017	1,652,861	31,640	669,526	17,069,698	19,423,725
2018	1,759,758	33,255	696,708	18,016,051	20,505,772
2019	1,858,782	34,958	724,185	18,977,474	21,595,399
2020	1,883,822	35,295	732,670	19,349,741	22,001,528
2021	1,998,769	36,370	741,500	20,478,261	23,254,900

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan Bapenda Jawa Timur

Menurut (BPS, 2020), Jumlah kendaraan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, salah satunya pada Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur saat ini menjadi kota dengan jumlah kendaraan bermotor yang padat dan selalu bertambah di setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor mencapai 14,732,894 unit yang terdiri dari 1,109,802 unit mobil penumpang, 28,722 unit bus, 636,913 unit truk, dan 12,957,457 unit sepeda motor.

Tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor mencapai 15,285,272 unit yang terdiri dari 1,290,866 unit mobil penumpang, 29,154 unit bus, 638,498 unit truk, dan 13,326,754 unit sepeda motor. Tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor mencapai 16,149,952 unit yang terdiri dari 1,355,398 unit mobil penumpang,

28,774 unit bus, 640,905 unit truk, dan 14,124,875 unit sepeda motor. Tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor mencapai 17,199,484 unit yang terdiri dari 1,450,876 unit mobil penumpang, 29,550 unit bus, 642,890 unit truk dan 15,076,168 unit sepeda motor. Tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor mencapai 18,408,190 unit yang terdiri dari 1,542,941 unit mobil penumpang, 30,285 unit bus, 644,795 unit truk, dan 16,190,169 sepeda motor.

Tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor mencapai 19,423,725 unit yang terdiri dari 1,652,861 unit mobil penumpang, 31,640 unit bus, 669,526 unit truk dan 17,069,698 unit sepeda motor. Tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor mencapai 20,505,772 unit jumlah kendaraan bermotor yang terdiri dari 1,759,758 unit mobil penumpang, 33,255 unit bus, 696,708 unit truk dan 18,016,051 unit sepeda motor. Tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor mencapai 21,595,399 unit yang terdiri dari 1,858,782 mobil penumpang, 34,958 unit bus, 724,185 unit truk, dan 18,977,474 unit sepeda motor. Tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor mencapai 22,001,528 unit yang terdiri dari 1,883,822 unit mobil penumpang, 35,295 unit bus, 732,670 unit truk dan 19,349,741 unit sepeda motor.

Dan pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor mencapai 23,254,900 unit yang terdiri dari 1,998,769 unit mobil penumpang,

36,370 unit bus, 741,500 unit truk, dan 20,478,261 unit sepeda motor.

Dilansir oleh web (detik.com) implementasi mengenai penggunaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor untuk perbaikan infrastruktur adalah di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 1,5 triliun dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Pendapatan tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan raya, pembangunan underpass, dan penataan taman kota.

Semakin krusial kendaraan bermotor guna mendukung aktivitas yang dilakukan masyarakat hal ini menyebabkan peningkatan setiap tahunnya. Kendaraan bermotor lebih disukai karena dianggap lebih efektif dalam memungkinkan pergerakan penduduk yang padat. Kebanyakan orang lebih suka bepergian dengan kendaraan bermotor daripada kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut karena lebih efisien dan mampu mencapai tujuan tertentu. Namun disamping itu terdapat peluang untuk meningkatkan pungutan pajak daerah, terutama melalui pajak kendaraan bermotor dan bea baik nama kendaraan bermotor karena padatnya kendaraan bermotor di Jawa Timur.

Jumlah Kendaraan Bermotor menjadi indikator terhadap potensi pendapatan dari PKB dan BBNKB. Semakin banyak jumlah

kendaraan bermotor yang terdaftar, maka potensi pendapatan dari PKB dan BBNKB juga akan semakin besar. Selain itu kesadaran masyarakat dalam membayar PKB dan BBNKB dapat mempengaruhi besarnya pendapatan dari PKB dan BBNKB. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk membayar pajak dan bea tersebut, maka potensi pendapatan juga akan berkurang. Kebijakan dan penerapan pengawasan yang efektif dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan BBNKB. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, maka potensi pendapatan juga akan semakin besar. Selanjutnya penggunaan dana PKB dan BBNKB juga dapat mempengaruhi pendapatan daerah, terutama jika dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak dan bea tersebut.

Menurut (Damayanti & Supramono, 2005) pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki fungsi krusial dalam meningkatkan jumlah pendapatan yang nantinya dikelola kembali untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pengambilannya pajak daerah umumnya bersifat wajib sesuai dengan Undang-undang No 28 tahun 2009. Pajak yang



diterima dari rakyat dan dikelola oleh pemerintah ini nantinya akan diklasifikasikan kepada pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota.

Menurut (Islami & Rahmawati, 2020) jumlah penduduk Jawa Timur yang besar merupakan salah satu dari penyebab tubuhnya fase motoritas, dimana fase tersebut memberikan dampak kepada jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti meningkatnya ketergantungan masyarakat pada beragam jenis kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Namun dari peristiwa tersebut terdapat pengaruh positif yang diberikan, yaitu adanya peningkatan pada pendapatan daerah.

Menurut (Utami, 2014) Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan yang menguasai kendaraan bermotor baik itu roda 2, roda 3 dan seterusnya. Tarif pajak kendaraan bermotor juga diterapkan berbeda, kepemilikan kendaraan bermotor pribadi sekurang-kurangnya dikenakan sebesar satu % dan maksimal hingga sepuluh %. Tarif dari pajak kendaraan bermotor kini kisaran angkanya 0,5% sampai dengan 1% khusus untuk ambulans, angkutan umum, kendaraan pemerintah, mobil pemadam kebakaran, serta segala jenis kendaraan polisi dan militer lainnya. Untuk selanjutnya, tarif pajak kendaraan bermotor bervariasi dari 0,1 % hingga 0,2 % untuk alat berat.

Selain itu pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur terbilang sudah mengikuti perkembangan jaman dan terus dilakukan pembaruan seperti halnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki beberapa strategi untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.

Di Jawa Timur saat ini untuk pembayaran pajak sudah bisa dilakukan atau dibayar di acara tertentu yang diadakan oleh Dinas Pendapatan Daerah setempat. Adapun peran dan fungsi daripada samsat keliling juga dapat membantu masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, hal ini diutamakan bagi masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu untuk antri. Selain itu dengan pembayaran pajak juga bisa dilakukan melalui online dengan mengunjungi laman Samsat Digital. Semua layanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memudahkan masyarakat dan wajib pajak untuk membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingginya jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur tentu didasari dengan total penduduk yang tinggi mencapai angka sebanyak 40,67 juta jiwa. Hal ini mengakibatkan angka kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya itu saja, pajak bea balik nama kendaraan bermotor juga memiliki peran penting dalam perkembangan PAD Provinsi Jawa Timur.

Kendaraan bermotor umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai mobilitas ekonomi. Namun, tidak semua mobilitas yang digunakan masyarakat merupakan baru. Kendaraan bermotor bekas berkualitas tinggi populer di kalangan masyarakat umum karena harganya lebih murah daripada kendaraan bermotor baru. Jadi tidak heran jika saat ini ada beberapa toko yang menjual kendaraan bermotor bekas yang layak pakai. Adanya transaksi jual beli kendaraan bekas ini tentu akan mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari pemilik pertama kepada pemilik kedua. Jika tidak dilakukan hal ini akan sangat merepotkan pada saat mau melakukan pembayaran pajak dan/atau perpanjangan. Selain itu pentingnya melakukan balik nama kendaraan bermotor agar kita terhindar dari tambahan pajak progresif akibat belum resminya kendaraan bermotor menjadi milik pribadi.

(Purnamawati, 2021) menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor dan timbulnya kesepakatan antara dua belah pihak yang mengakibatkan jual beli. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengalihan nama adalah beralihnya kedudukan kepemilikan antara penjual ke pembeli.

Keduanya merupakan pajak provinsi yang pungutannya dimasukkan dalam pendapatan provinsi. Menurut Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur

Nomor 188/158/KPTS/013/2016. Kedua pajak ini dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, dengan pengolahan bagi hasil sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kedua pajak yang disebutkan tersebut memberikan pengaruh yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur, hal ini yang mengakibatkan Jawa Timur menjadi provinsi yang otonom dalam hal memperoleh dan mengelola keuangan daerah sehingga tidak perlu suntikan dari pemerintah pusat (Adisasmita, 2011).

Dalam konteks ini, kemandirian mengacu pada otonomi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Makin kuat kemandirian suatu provinsi, maka semakin tangguh perekonomian daerahnya dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi nasional dan global, seperti pengeluaran pemerintah, kerentanan ekonomi, serta perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini akan berdampak pada besarnya dukungan yang diberikan kepada pemerintah pusat di masa mendatang. Oleh sebab itu, adanya kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah, guna melakukan evaluasi dan pembelajaran untuk kedepannya. Dari

beberapa hal diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh parsial dan simultan serta kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021?
2. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021?
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan signifikansi kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a) Memahami pengaruh dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur.

#### 1.4.2 Manfaat Praktisi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dibuat terdapat beberapa kegunaan didalamnya, yaitu :



- a) Bagi Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang urgensinya membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna keberlangsungan pembangunan daerahnya.
- b) Bagi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai bahan bacaan, referensi, dan juga panduan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c) Informasi bagi pengambil kebijakan untuk dipertimbangkan dalam memanfaatkan secara maksimal kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak Daerah**

Menurut (Algifari, 1998) Perpajakan merupakan hak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang, karenanya pemerintah berhak memungut pajak. Pajak dikumpulkan sesuai dengan persyaratan legislatif yang dikenakan pada subjek pajak, serta Undang-undang pelaksanaannya. Sementara itu Perpajakan digambarkan sebagai iuran rakyat ke kas negara yang tidak segera bisa dirasakan dan digunakan (R. Soemitro, 1990).

Pajak daerah adalah pembayaran yang wajib untuk dibayarkan oleh orang pribadi kepada daerah dan dipungut menurut ketentuan peraturan per Undang-undangan yang dipergunakan sebagai bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun pemerintah pusat yang memungut pajak umum, sering dikenal sebagai pajak pusat, sedangkan pemerintah daerah, yang mencakup pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dikenal sebagai pajak daerah (Utami, 2014).

##### **2.1.1.1. Tolak ukur penilaian pajak daerah**

Ada berbagai standar umum untuk menilai pajak daerah menurut (Devas, 1989) dalam bukunya yang berjudul “Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, antara lain :

1. Berdasarkan hasil atau *yield*, untuk mengetahui perolehan hasil pajak terhadap biaya layanan yang diberikan pemerintah dapat dilihat dengan elastisitas tidaknya hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, serta pajak pengembalian perbandingan dengan biaya yang dikenakan.
2. Berdasarkan keadilan atau *equity*, yaitu dalam mengetahui pengenaan biaya pajak pada wajib pajak harus transparan untuk menghindari tindak kecurangan dari pemerintah daerah.
3. Berdasarkan prinsip efisien ekonomi, biaya pengananan pajak harus sesuai aturan yang berlaku dan tidak mengganggu biaya produksi, mengurangi konsumsi, pengalihan bidang usaha yang mengakibatkan merosotnya ekonomi.
4. Berdasarkan penerapannya, tolak ukur penilaian pajak harus sesuai aturan Undnag-Undang mengeni peraturan perpajakan.
5. Berdasarkan kesesuaian, Prinsip ini menggarisbawahi perlunya pembayaran pajak secara teratur jika beban pajak tertentu merupakan sumber pendapatan daerah.

#### 2.1.1.2. Kriteria pajak daerah

Secara jelas kriteria pajak daerah dapat diuraikan oleh (Davey, 1988) terdiri dari 4 (empat) hal :

1. Pemerintah Daerah memungut pajak tergantung pada peraturan daerah itu sendiri.

2. Pengenaan pajka harus sesuai dengan Undang-Undang Peraturan daerah, meskipun tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pemungutan pajak ditetapkan oleh Peraturan daerah.
4. Pemerintah Pusat memungut dan mengadministrasikan pajak, tetapi pendapatan retribusi tersebut didistribusikan kepada Pemerintah Daerah.

#### 2.1.1.3. Jenis pajak daerah

Adapun jenis pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, seperti :

1. Pajak provinsi, antara lain:
  - Pajak Kendaraan Bermotor, biasa disebut pajak yang dikenakan oleh pemilik atas kuasa kendaraan bermotornya.
  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak yang dipungut akibat adanya perpindahan hak milik yang awalnya diakibatkan pembelian motor bekas dan atas persetujuan dua belah pihak.
  - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pajak yang diberikan akibat dari adanya penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, seperti bensin, dan lain-lain.
  - Pajak rokok pungutan atas cukai rokok, pajak atas produksi rokok yang dikelola oleh pemerintah.

## 2. Pajak kabupaten/kota

- Pajak Hotel, Menurut Peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel, pajak hotel disebut sebagai pajak daerah atas kegiatan hotel. Hotel merupakan tempat yang dibuat untuk seseorang sekedar *staycation* atau menginap dan beristirahat yang tentunya dengan mendapatkan fasilitas dengan biaya yang berbeda-beda, termasuk bangunan tambahan yang dipelihara, diurus, dan dimiliki oleh pihak yang sama. Orang pribadi atau badan usaha yang membayar jasa hotel dianggap sebagai subjek pajak hotel, sedangkan semua jasa yang diberikan melalui pembayaran di hotel dianggap sebagai objek pajak hotel.
- Pajak Restoran, pajak restoran terkadang dikenal sebagai pajak pertambahan nilai, pajak ini adalah pungutan lokal yang diberikan dari pelayanan restoran, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 29 yang mengatur tentang Pajak Restoran. Restoran adalah tempat di mana orang dapat mengonsumsi makanan dan/atau minuman dengan harga tertentu, berbeda dengan bisnis katering atau jasa katering. Tarif yang dikenakan dalam pajak restoran adalah sebesar 10%.
- Pajak hiburan, hiburan mencakup seluruh jenis tayangan gratis, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian.

Pajak hiburan menyasar semua penyelenggara hiburan, sedangkan subjek pajaknya adalah siapa saja yang menonton atau menikmati hiburan.

- Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah Nomor 27 tentang Pajak Reklame, dikenal dengan istilah pajak reklame, dan merupakan retribusi daerah atas pengelolaan reklame. Iklan adalah benda, alat, dan media yang untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, mengusulkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau didengar dari suatu lokasi oleh publik, kecuali oleh pemerintah. Penyelenggara reklame adalah objek pajak, sedangkan pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
- Pajak penerangan jalan merupakan pungutan pajak atas penggunaan penerangan jalan, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah mineral bukan logam serta batuan yang digunakan untuk dimanfaatkan dari sumber



alam yang terdapat di dalam dan/atau di permukaan bumi.

- Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang diberikan sebagai bagian dari perusahaan induk atau sebagai perusahaan tersendiri, termasuk penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor.
- Pajak Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau penggunaan air tanah. Air yang terkandung di dalam tanah atau lapisan batuan di bawah permukaan tanah disebut sebagai air tanah.
- Pajak sarang burung walet, merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut atas properti dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, dan/atau digunakan oleh orang atau perusahaan, dengan pengecualian areal yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan, dan operasi komersial pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi

yang meliputi daratan, perairan pedalaman, dan laut dalam wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah struktur teknologi yang ditanam atau dihubungkan secara permanen dengan daratan, perairan pedalaman, dan/atau laut.

- Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTP), pajak ini merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTP berlaku tidak hanya untuk jual beli tanah, namun juga untuk hak atas tanah dan bangunan yang didapatkan melalui warisan, hibah, tukar menukar tanah. Landasan hukum dari BPHTP yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.

Dalam hal perpajakan daerah, yang kaitannya dengan pendapatan fiskal daerah. Sumber yang paling banyak dalam menanggung pembiayaan dalam urusan rumah tangga daerah yaitu retribusi daerah. Selain itu sumber utama dalam pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### 2.2.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas pemilikan yang menguasai kendaraan bermotor baik itu roda 2, roda 3 dan seterusnya. (Wulandari, 2018)

#### 2.2.1.1. Dasar hukum PKB

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yang berubah menjadi Undnag-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan pemerintah tentang Pajak Daerah Nomor 65 tahun 2001.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB.
4. Peraturan yang dibuat oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenanan PKB dan BBNKB Tahun 2006.
5. Peraturan yang dibuat oleh Peraturan Gubernur yang isinya mengenai aturan PKB yang diatur oleh provinsi.

#### 2.2.1.2. Jenis – Jenis pajak kendaraan bermotor

PKB dasarnya terdiri dari pajak sepeda motor seperti sedan dan sejenisnya antara lain jeep; bus; microbus; pick up; truk; dan alat berat lainnya.

#### 2.2.1.3. Tarif PKB

Pungutan PKB ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi setempat. Menurut Peraturan Pemerintah pasal 5 No. 65 Tahun

2001, tarif PKB digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan jenis pengendalian kendaraan bermotor, yaitu:

1. 1,5% untuk motor yang bukan untuk umum. Seperti motor pribadi.
2. 1% motor yang umum. Seperti halnya mobil yang digunakan untuk angkutan umum dan dikenakan tarif bayaran.
3. 0,5% untuk jenis berat seperti alat-alat besar.

#### 2.2.1.4. Dasar hukum pemungutan PKB

Dasar Hukum Pemungutan PKB yaitu Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

#### 2.3.1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor dan timbulnya kesepakatan antara dua belah pihak yang mengakibatkan jual beli. Dalam hal ini, arti dari pengalihan nama adalah beralihnya kedudukan kepemilikan antara penjual dan pembeli. (Purnamawati, 2021)

(R. H. Soemitro, 1990) menunjukkan bahwa prosedur pengalihan nama tersebut dilakukan di kantor Samsat setempat. Nama pemilik baru kemudian akan muncul di buku BPKB dan STNK.

#### 2.3.1.1. Dasar hukum pemungutan BBNKB

Adapun mengenai landasan hukum yang di atur untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Timur.
2. Peraturan presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

#### 2.3.1.1. Subjek dan objek pajak BBNKB

Wajib pajak kendaraan bermotor atau pemilik baru kendaraan bermotor adalah Subjek pajak BBN-KB. Sedangkan Objek BBN-KB adalah pengalihan kendaraan bermotor dalam hak milik sendiri.

#### 2.3.1.2. Dasar Pengenaan Tarif BBN-KB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan berdasarkan dua kriteria utama, yaitu:

- a. Harga jual kendaraan bermotor.
  - b. Bobot menunjukkan proporsi kerusakan jalan dan polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.
- Berikut tarif BBN-KB atas penyerahan perdana kendaraan baru (BBN-I) :

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentukan dengan tarif sebesar mungkin untuk masing-masing hal sebagai seperti, tingkat pengajuan pertama ditentukan sebesar 20 % dan untuk pengajuan kedua dan selanjutnya ditentukan sebesar 1 %.
- b. Tarif 15 % dikalikan dengan NJKB untuk motor roda 2 dan roda 3.
- c. Tarif 12,5% dikalikan dengan NJKB untuk motor non umum roda empat atau lebih.
- d. Untuk angkutan umum yang mengangkut orang sebesar 7,5% dikalikan 60% dengan dikalikan NJKB.
- e. Untuk angkutan umum yang mengangkut barang sebesar 7,5% dikalikan 80% dengan dikalikan NJKB.
- f. Tarif 12,5% dikalikan dengan NJKB untuk kendaraan bermotor seperti Ambulance, Pemadam Kebakaran, dan Instansi Pemerintah roda 4 (empat) atau lebih.
- g. Sama dengan f namun apabila motor instansi pemerintah memiliki roda 2 atau 3 dikalikan 15% dengan NJKB.

- h. Tarif sebesar 0,75% dikalikan 40% dengan dikalikan NJKB untuk alat-alat berat dan besar.
- Tarif BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II) yaitu sebagai berikut:
  - a. Tarif 1% dikalikan NJKB untuk motor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih.
  - b. Tarif 1% dikalikan 60% dengan dikalikan NJKB untuk angkutan umum yang mengangkut orang.
  - c. Tarif 1% dikalikan 80% dengan dikalikan NJKB untuk angkutan umum yang mengangkut barang.
  - d. Tarif 0% untuk kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah Provinsi dengan jumlah roda 2,3 dan 4.
  - e. Tarif 0,075% dikalikan 40% dikalikan dengan NJKB untuk alat-alat besar dan berat.

#### **2.4.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut landasan hukumnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan penghasilan daerah yang dikumpulkan dari sumber daerah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan Undang-undang guna mensejahterakan masyarakat daerah.

Menurut (Halim, 2004), Semua pendapatan yang diperoleh di wilayahnya sendiri sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor



pendapatan sangat penting karena menunjukkan seberapa jauh suatu daerah dapat mendanai pertumbuhan dan pembangunan daerah.

(Warsito, 2001) menyatakan pendapatan asli daerah adalah penghasilan yang didapatkan oleh perda. Pajak sendiri, pungutan PAD dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sumber daya asli daerah lain yang sah juga merupakan sumber PAD.

Menurut penelitian (Herlian, 2005) Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang asalnya dari daerah, pendapatan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah dihasilkan sebagai hasil penerapan otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi.

#### 2.4.1.1. Sumber – sumber Pendapatan PAD

Mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah, menurut “UU No.28 tahun 2009”, adapun pajak – pajak yang dikelola provinsi sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

Selain itu, berdasarkan “UU No 28 tahun 2009” tentang retribusi daerah, yang dimaksud oleh retribusi adalah tarif atas

izin yang di tentukan dan diberikan oleh Perda untuk masyarakat. Yang dimana hal ini dimaksudkan untuk suatu tindakan pengabdian masyarakat pada penyedia fasilitas yang bisa digunakan dan dinikmati bersama.

- Ciri- ciri Retribusi Daerah :

- a) Pungutan dilakukan oleh Perda
- b) Dalam hal pemungutan adanya pemaksaan ekonomis
- c) Terdapat kontraprestasi yang dapat langsung ditunjuk
- d) Retribusi daerah akan dikenakan pada setiap orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Perorangan atau badan usaha wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan UU yang tersedia, termasuk pemungutan atau pemotongan pungutan tertentu, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jangka waktu retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan dimana pembayar retribusi dapat memperoleh pelayanan dan izin dari pemerintah daerah setempat.

Selanjutnya, Tarif dari Retribusi Daerah adalah besaran rupiah yang diperhitungkan guna menentukan tingkat retribusi daerah yang terutang. Tarif tersebut dapat dihitung secara merata atau berbeda menyesuaikan dengan tujuan dan tarif yang ditentukan, seperti selisih Retribusi Rekreasi yang ditentukan untuk anak dan orang dewasa. Tarif retribusi umumnya ditinjau

dengan berkala melalui besarnya tingkat pembalasan dengan mempertimbangkan dan menetapkan tujuan retribusi, hal ini untuk memprediksi perkembangan ekonomi regional terkait retribusi oleh subjek yang relevan. Dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001” diatur bahwa besaran retribusi harus ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap lima tahun.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021”, antara lain :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Teknik Analisis Data	Hasil Pembahasan	Perbandingan
1.	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermototr Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah (Purnamawati, 2021)	Kualitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini PKB dan BBNKB berkontribusi penuh dalam pendapatan daerah. Dan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan	Persamaan dalam penelitian ini adalah daam pembahasan dan masalah sama-sama membahas mengenai kontribusi PKB Terhadap PAD. Perbedaan dala penelitaian ini pada penggunaan metode yakni

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Teknik Analisis Data	Hasil Pembahasan	Perbandingan
			Bermotor merupakan sumber utama dari pajak daerah.	metode yang digunakan metode Kualitatif deskriptif.
2	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara (Djambula et al., 2019)	Kualitatif Deskriptif	Selama periode 2014-2020, dedikasi PKB terhadap PAD sangat bervariasi (naik turun), dengan rata-rata sebesar 32,03%. Namun efisiensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami perubahan (naik turun) dengan nilai rata-rata sebesar 96,64% dari tahun 2014 ke tahun 2020. Sedangkan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap	Persamaan dalam penelitian menjelaskan mengenai PKB dan BBN-KB Terhadap PAD. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam pada metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Teknik Analisis Data	Hasil Pembahasan	Perbandingan
			pendapatan asli daerah berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata sebesar 107,63% dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Dari analisis diatas menunjukan bahwa BBNKB berkontribusi cukup tinggi pada PAD.	
3	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang (Mila et al., 2021)	Metode Kuantitatif analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda	Efikasi PKB dan BBNKB yang bervariasi dapat menjelaskan 20,1% pendapatan asli daerah.	Persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai PKB dan BBN-KB terhadap PAD daerah Kabupaten Batang. Dan juga kesamaan dalam teknik analisis data
4	Analisis Kontribusi Bea Balik Nama Keandaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan	Metode yang digunakan Kuantitatif	Dalam penelitian ini BBN-KB dan PBB berpengaruh	Persamaan pada penelitian ini adalah kedua variabel dan pembahasannya

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Teknik Analisis Data	Hasil Pembahasan	Perbandingan
	Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019 (Ningsih et al., 2021)		signifikan terhadap Pendpaatan Asli Daerah Provinsi Sulse.	hampir sama. Perbedaan penelitian ini adalah perhitungan kontribusi dalam penyelesaiannya.
5	Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara (Kansil et al., 2018)	Metode analisis deskriptif dengan Teknik analisis yang digunakan analisis rasio.	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PKB provinsi Sulut dinilai signifikan dengan %tase efektivitas tahun 2014 sebesar 96,18 % dan meningkat sebesar 97,00 % pada tahun 2015. Dimana dalam kriteria sangat efektif untuk tahun 2016 dan 2017. Tumbuh sebesar 108,17 % pada tahun 2016 dan sebesar 107,28 % pada tahun 2017. Hal ini didasari dengan	Persamaan dalam penelitia ini menjelaskan potensi PKB sebagai sumber PAD dimana penelitian ini mash signifikan pada judul penelitian yang dibuat. Perbedaan perhitungan efektivitas, kontribusi dan potensi PKB.

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Teknik Analisis Data	Hasil Pembahasan	Perbandingan
			kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.	
6	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie (Rakhmad Rinaldi Wahfar, 2014)	Metode Analisis Regresi Linier Berganda.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki pengaruh yang menguntungkan dan cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie.	Persamaan penelitian ini yaitu dilihat dari judul masih sangat relevan pada penelitian yang dibuat variabel yang digunakan sama. perbedaan penelitian ini adalah PAD pada kabupaten Pidie
7	Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta	teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.	Dalam penelitian ini PKB dan BBNKB Provinsi Jambi dikatakan tidak efektif terhadap PAD dan	Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel PKB dan BBNKB dan pembahasannya terhadap PAD.



No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Teknik Analisis Data	Hasil Pembahasan	Perbandingan
	dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi (Asri Aditya et al., 2021)		penerimaannya juga tidak signifikan terhadap PAD Provinsi Jambi 2014-2018.	Peberdaan penelitian ini adalah evaluasi dan dampak.
8	Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Palopo (Wahida & Sorong, 2018)	Kuantitatif dengan data sekunder	Berdasarkan temuan kajian dan pembahasan sebelumnya dapat digaris bawahi bahwa PKB dan BBNKB pada PAD di Kota Palopo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sangat baik, dengan nilai rata-rata sebesar 55,20 %. Dan PKB memberikan kontribusi yang cukup besar pada PAD di Kota Palopo, dengan nilai 43,15 % jika dibandingkan	Persamaan penelitian ini adalah pada metode yang digunakan yakni kuantitatif. Perbedaan penelitian ini adalah variabel yang digunakan hanya satu PKB.

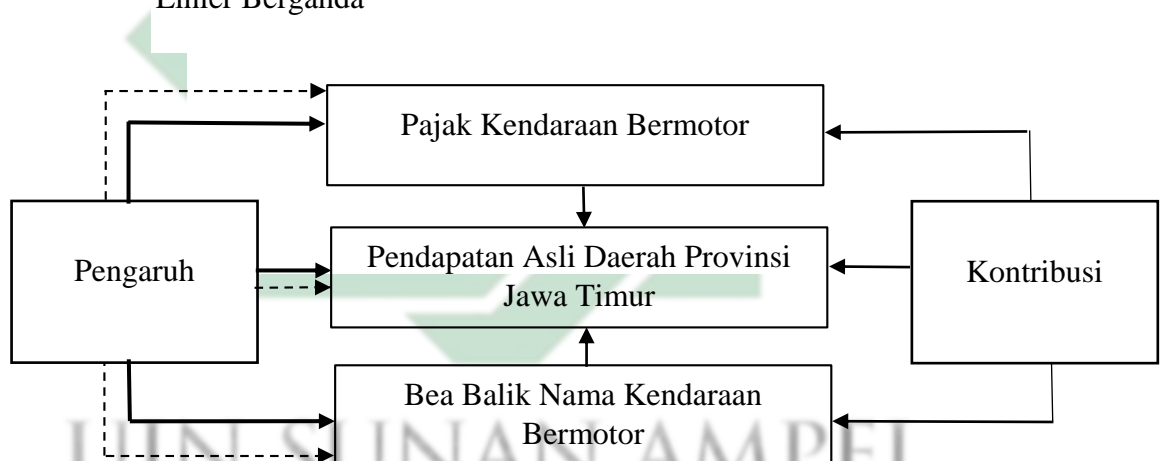
No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Teknik Analisis Data	Hasil Pembahasan	Perbandingan
			dengan bus yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,81 %, dan mobil yang memberikan kontribusi sebesar 10,83 %.	
9	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Samsat Kota Makassar) (Lukman et al., 2015)	Kuantitatif dengan metode Analisis Regresi Sederhana	Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2013 PKB menyumbang 54% dari total PAD yang direalisasikan. Dan terus meningkat sampai pada tahun 2017 relaisasi PKB sebsar 33,93% dari total PAD Kota Makassar.	Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai PAD terhadap PKB. Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai maknisme pemungutan pajak dengan standar oprasional prosedur.
1	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap	Kualitatif deskriptif	Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah jumlah kontribusi PKB dari tahun 2013-	Persamaan penelitian ini dalam variabel dan objek penelitian. Perbedaan penelitian ini

No.	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Teknik Analisis Data	Hasil Pembahasan	Perbandingan
	Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (Islami & Rahmawati, 2020)		2017 terus meningkat dan BNKB dari tahun 2013-2017 juga terus meningkat. Kedua jenis pajak ini berpeluang untuk diperluas. Dengan diharapkannya kedua pajak ini bisa meningkatkan pendapatan di masa yang akan data sehingga dalam proses pembangunan nasional tidak ada hambatan dan terus ditingkatkan.	adalah pada periode tahun dan teknik analisis data.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tmur Tahun 2012-2021” ditunjukkan untuk menganalisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendararaan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012- 2021 dan menganalisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendararaan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012- 2021. Serta menganalisis kontirbusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendararaan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

Keterangan garis:

- Secara Parsial
- - - - - Secara Simultan
- Kontribusi

### 2.3.1 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. H1 = Diduga variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.

H<sub>01</sub> = Diduga variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.

2. H2 = Diduga variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.

H<sub>02</sub> = Diduga variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.

3. H3 = Diduga variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.

$H_0$  = Diduga variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. (Kuncoro, 2003) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang mengumpulkan data guna menguji hipotesis dan menjawab hasil akhir dari subjek penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan model matematika, statistik, atau komputer (Sugiyono, 2017). Akibatnya, teknik deskripsi kuantitatif dapat dipandang sebagai strategi untuk mengkarakterisasi dan mengkomunikasikan situasi dan kejadian secara akurat.

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Linier Regression Method*) digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi data yang akan diteliti guna mengetahui ada hubungan antara kedua variabel tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar atau tidak. Pendekatan ini dikatakan menawarkan kualitas unggul atau secara teknis sangat kuat dengan interpretasi sederhana.

#### 3.2. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Manyar Kertoarjo No. 1 Surabaya, Jawa Timur dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Jawa Timur di Jl. Johar No 19-21 Surabaya. Adapun dasar pemilihan lokasi penelitian ini karena

Badan Penerimaan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk pemungutan dan pengumpulan pendapatan daerah. Sebagai informasi pengumpulan data penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dimulai pada tanggal 14 Februari 2023 – 14 April 2023.

### **3.3. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel**

Untuk mempermudah analisis dan menjelaskan variabel yang ada di penelitian ini maka dilakukanlah pengukuran variabel, sebagai berikut :

#### **3.3.1 Variabel Independen**

##### **1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak atas kepemilikan yang menguasai kendaraan bermotor baik itu roda 2, roda 3 dan seterusnya. Dapat diperkirakan keikutsertaan PKB terhadap PAD dengan membandingkan jumlah pajak kendaraan bermotor yang sebenarnya dengan jumlah pendapatan asli daerah yang sebenarnya.

##### **2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah biaya yang dikenakan atas kepemilikan motor sebagaimana ditetapkan dalam sertifikat kendaraan bermotor sebagai akibat dari jual beli, atau kegiatan lain yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan.



Untuk mengukur BBN-KB yaitu dengan membandingkan besaran bea balik nama kendaraan bermotor dengan besaran pendapatan asli daerah yang sebenarnya.

### 3.3.2. Variabel Dependen

“Pendapatan Asli Daerah” merupakan pendapatan daerah yang dikumpulkan dari sumber yang ada di dalam daerah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan UU guna mensejahterakan masyarakat daerah.

Kuantitas pendapatan asli daerah dihitung dengan menjumlahkan jumlah pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain.

## 3.4. Jenis dan Sumber data

### 3.4.1 Jenis Data

Data adalah sekumpulan kejadian yang diperoleh dari fakta yang dapat direpresentasikan sebagai 3 jenis yaitu simbol, huruf, angka atau kombinasi dari ketiganya. Data tersebut masih belum cukup untuk dijadikan kesimpulan, sehingga harus dikaji lebih lanjut. Studi ini dilakukan di Jawa Timur, di mana kendaraan bermotor banyak digunakan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang ada. Data sekunder untuk penelitian ini didapatkan antara lain dari BPS, buku, makalah,

jurnal dan pendataan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur pada bidang perencanaan dan pengembangan serta pendataan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian analisis ini meliputi:

- Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.
- Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021
- Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2012-2021.
- Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur 2012-2021.

#### 3.4.2. Sumber Data

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian analisis ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk badan pemerintah dan publikasi terkait, seperti:

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hipotesis yang telah dikemukakan. Model analisis yang digunakan adalah perhitungan “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dengan menggunakan model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.0 for Windows guna mengetahui “pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rentan waktu 10 Tahun 2012-2021”, sebagai berikut:

#### 3.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier merupakan metode yang dipergunakan untuk menyatakan pola antara variabel Y dan variabel X. Apabila variabel X berjumlah lebih dari satu maka menggunakan analisis linier berganda. (Sugiyono, 2017).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots \quad (3.1)$$

Keterangan:

Y : Pendapatan Asli Daerah

$\alpha$  : Konstanta

X1 : Pajak Kendaraan Bermotor

X2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

$\beta_1, \beta_2$  : Koefisien regresi variabel independen

e : Error term

Pada permodelan regresi linier berganda terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu untuk uji kelayakan model diperlukan dalam tahapan analisis regresi berganda meliputi uji F, uji T, koefisien determinan dan pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (Yuliara, 2016).

#### 1. Uji F

Uji F merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel dependen. Tahapan uji-f adalah sebagai berikut:

##### a) Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )

Nilai  $\alpha$  yang sering digunakan adalah 5% / 0,05

##### b) F hitung

$$F_{hit} = \frac{r^2/k}{(1-r^2)/(n-k-1)} = \frac{r^2(n-k-1)}{k(1-r^2)} \quad (3.2)$$

##### c) Menentukan F tabel

Dimana tabel uji F dengan derajat kebebasan pembilang (Numerator, df) = k-1 dan untuk penyebut (denominator, df) = n - k

n : jumlah pengukuran,

k : jumlah variabel independen dan dependen.

d) Dasar pengambilan keputusan

- Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- Jika nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

2. Uji T

Dalam Uji T ini bertujuan mengetahui apakah persamaan model regresi yang berbentuk secara parsial variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

a) Dasar pengambilan keputusan

- jika nilai sig < 0,05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y.
- jika nilai sig > 0,05 atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

3. Koefisien determinan ( $r^2$ )

a) Rumus  $r^2$

$$r^2 = \frac{(b_1 \sum x_1 y) + (b_2 \sum x_2 y)}{\sum y^2} \quad (3.3)$$

b) Dengan penentuan keputusan

- Apabila  $r^2$  bernilai 0, maka variasi variabel dependen tidak sedikitpun dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen
- Apabila  $r^2$  bernilai 1, maka variabel dependen secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

3.5.2. Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Uji normalitas ini umumnya digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan terikat berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai lebih besar dari 5% atau 0,05, maka data berdistribusi normal, sebaliknya data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan adanya keterkaitan atau korelasi antara dua atau lebih variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Adanya multikolinearitas dideteksi dengan adanya nilai standard error yang signifikan dari variabel independen dalam model regresi.

Ada berbagai metode untuk mendeteksi multikolinearitas, antara lain:

- Jika ada korelasi antara variabel independen > 0,8 dapat diindikasikan adanya multikolinearitas
- Jika ada nilai standar error > 1 maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas
- Melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10,00 dapat diindikasikan tidak adanya multikolinearitas.
- Rumus *Variance Inflation Factor* (VIF)

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2)} \quad (3.4)$$

- Rumus Nilai *Tolerance*

$$Tolerance = 1 - R^2 \quad (3.5)$$

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini menilai apakah ada ketidasmamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear dan dimana keadaan adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebasnya. Cara mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser, Uji Park, Uji Spearman, Melihat Grafik.

#### 4. Uji Autokorelasi Durbin Watson

Dalam Uji Durbin Watson ini dapat digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi utokorelasi atau tidak pada nilai residual dari analisis regresi. Autokorelasi sendiri adalah hubungan diantara nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Uji ini juga cocok untuk analisis regresi model time series.

Dengan dasar :

- $D < DL$  atau  $D > 4-DL$  artinya terdapat Autokorelasi
- $DL < D < 4-DU$ , artinya tidak terdapat Autokorelasi
- $DL < D < DU$  atau  $4-DU < D < 4-DL$ , artinya Tidak ada kesimpulan.

Selain itu apabila saat pengujian Autokorelasi tidak menghasilkan terjadinya autokorelasi atau tidak maka alternatif lain yaitu dengan menggunakan metode Uji Run Test .

Dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji Run Test, sebagai berikut :

- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $< 0,05$  maka terdapat gejala autokorelasi
- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  maka tidak terdapat gejala autokorelasi.



### 3.6.3. Analisis kontribusi

Kontribusi menurut KBBI adalah sumbangan atau keikutsertaan dalam hal ini kontribusi bisa berupa tindakan atau materi. Dan dalam penelitian ini kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan dana Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.

Rumus perhitungan Kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi PKB/BBNKB}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \quad (3.6)$$

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis Data

##### 4.1.1. Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini mengambil data PAD Jawa Timur di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 4. 1 Realisasi PAD Jawa Timur Tahun 2012-2021  
(Triliun Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Prov. Jawa Timur
2012	9,584,081,971,227.10
2013	11,579,222,929,456.70
2014	14,462,753,136,957.30
2015	15,402,647,674,502.50
2016	15,817,795,024,797
2017	17,324,177,664,424.20
2018	18,531,062,021,823.40
2019	19,327,125,485,405.90
2020	17,951,235,057,953.10
2021	18,935,885,925,145.61

Sumber : BPKAD Jawa Timur

Dan adapun data realisasi PKB dan BBNKB yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 4. 2 Realisasi PKB dan BBNKB Tahun 2012-2021  
(Triliun Rupiah)**

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi BBNKB
2012	3,287,115,434,460.00	3,138,054,141,300.00
2013	3,896,191,221,560.00	3,836,938,435,381.00
2014	4,309,076,812,085.00	4,064,726,227,300.00
2015	4,911,629,320,175.00	3,534,090,028,065.00
2016	5,300,947,249,143.00	3,710,574,601,900.00
2017	5,889,902,148,435.00	3,705,349,480,779.00
2018	6,448,692,325,911.00	4,089,296,812,767.00
2019	6,890,439,193,872.00	4,232,540,305,900.00
2020	6,566,187,985,216.00	3,022,188,308,400.00
2021	6,874,180,353,260.00	3,807,178,988,962.00

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya perhitungan dan pengolahan data analisis regresi linier berganda meliputi uji F, uji T, koefisien determinan dan pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolerasi, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi menggunakan SPSS 21.

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKB	10	3.287.115.43 4.460,00	6.890.439.193 .872,00	5.437.436.20 4.411,6990	1.301.473.90 5.342,79830
BBNKB	10	3.022.188.30 8.400,00	4.232.540.305 .900,00	3.714.093.73 3.075,4000	394.307.823. 868,57810
PAD	10	9.584.081.97 1.227,10	19.327.125.48 5.405,90	15.891.598.6 89.169,2800	3.248.916.94 5.126,04700
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Output 1 SPSS 21

Dari hasil Output 1 uji Statistik Deskriptif diatas, dapat disimpulkan antara lain:

- Variabel Pajak Kendaraan Bermotor menunjukan bahwa selama periode penelitian memiliki nilai terendah (*Minimum*) sebesar 3.287.115.434.460 yang menjukan nilai terendah PKB selama pengamatan tahun 2010 dan nilai tertinggi (*Maximum*) PKB sebesar 6.890.439.193.872 yang menjukan nilai tertinggi dari PKB selama pengamatan tahun 2019. Nilai rata-rata (*Mean*) Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan adalah sebesar 5.437.436.204.411 dengan Nilai Standart Deviasi sebesar 1.301.473.905.342.
- Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki nilai terendah (*Minimum*) sebebsar 3.022.188.308.400 selama pengamatan penelitian pada tahun 2010 dan nilai tertinggi

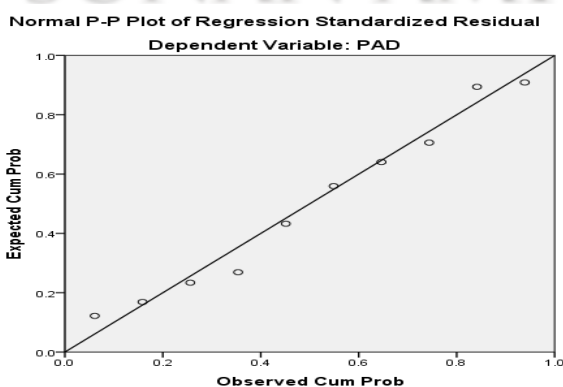
(*Maximum*) sebesar 4.232.540.305.900 selama pengamatan penelitian pada tahun tahun 2019. Nilai rata-rata (*Mean*) BBNKB secara keseluruhan sebesar 3.714.093.733.075 dengan Nilai Standar Deviasi sebesar 394.307.823.868.

- Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai terendah (*Minimum*) PAD sebesar 9.584.081.971.227 selama pengamatan penelitian pada tahun 2010 dan nilai tertinggi (*Maximum*) PAD sebesar 19.327.125.485.405 selama pengamatan penelitian pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*Mean*) PAD sebesar 15.891.598.689.169 dengan Nilai Standart Deviasi sebesar 3.248.916.945.126.

#### 4.1.2. Pengujian Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

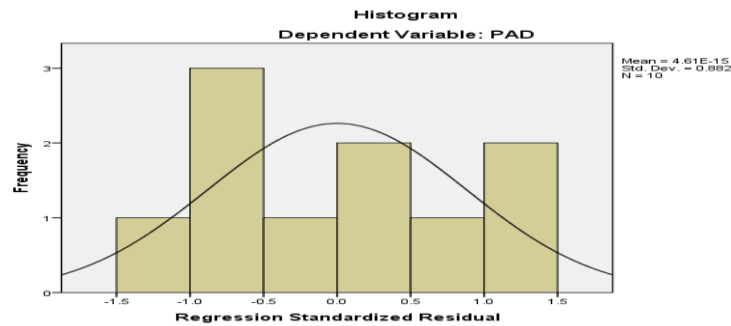
Uji normalitas dibawah ini menggunakan Grafik *Normal Probability Plot*, Grafik histogram dan tabel *One Sample Kolmogorov-Smirnov*



Sumber : Output2 SPSS 21

**Gambar 4. 1 Uji Normalitas**

Berdasarkan output pada Grafik Normal Probability Plot, dimana semua Plotnya mendekati garis diagonal yang menunjukan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.



Sumber : Output2 SPSS 21

**Gambar 4. 2 Uji Normalitas**

Berdasarkan output uji garfik Histogram menyimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, karena bentuk histogram mengikuti garis diagonal.

**Tabel 4. 4 Uji Normalitas**

*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0032043
	Std. Deviation	614352872640.13960000
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		.498
Asymp. Sig. (2-tailed)		.965

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output 2 SPSS 21

Berdasarkan output 2 pada tabel uji Normalitas tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukan bahwa nilai

signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,965 maka bisa disimpulkan bahwa nilai sig  $0,965 > 0,05$  maka data tersebut dikategorikan berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinieritas

Pada uji multikolinieritas antar variabel tidak terjadi apabila nilai Tolerance  $> 0,10$  dan Nilai VIF  $< 10$

**Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas**

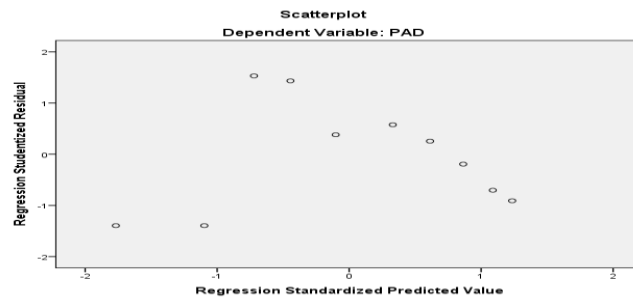
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
PKB	.929	1.076
BBNKB	.929	1.076

Sumber : Output t3 SPSS 21

Pada Uji Multikolinieritas diperoleh nilai Tolerance  $0,929 > 0,10$  maka artinya Tidak terjadi Multikolinieritas dan nilai VIF  $1,076 < 10,00$  sehingga bisa dikatakan Tidak terjadi Multikolinieritas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai variabel dependen yaitu ZPRED dengan residulanya SRESID.



Sumber : Output3 SPSS 21

### Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Output 3 grafik plot dapat disimpulkan bahwa Tidak terjadi Heteroskedastisitas karkena grafik plot tidak menunjukkan bentuk pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi layak digunakan.

#### d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.290

Sumber : Output 4 SPSS 21

Berdasarkan Output 4 tabel Uji Autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin Watson disimpulkan bahwa Tidak Ada Kesimpulan. Dimana adanya dasar dalam uji Autokorelasi Durbin Watson yaitu :  $D < DL$  atau  $D > 4-DL$  artinya terdapat Autokorelasi,  $DL < D < 4-DU$ , artinya tidak terdapat Autokorelasi,  $DL < D < DU$  atau  $4-DU < D < 4-DL$ , artinya Tidak ada kesimpulan.



Dengan hasil  $DL < D < DU = 0.6413 < 1.290 < 1.6413$  artinya tidak ada kesimpulan.

Pengujian Run Test dilakukan guna untuk mengatasi masalah uji autokorelasi dengan kesimpulan yang tidak pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi.

**Tabel 4. 7 RunsTest**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

a. Median

Sumber: Output 5 SPSS 21

Berdasarkan Output 5 dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar  $0,737 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Tidak Terdapat Masalah Autokorelasi, sehingga analisis regresi linier berganda dapat dilanjutkan.

#### 4.1.3. Penentuan Hipotesis

**Tabel 4. 8 Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-651050700061.037	2234711071189.031
PKB	2.352	.185
BBNKB	1.011	.611

Sumber: Output 6 SPSS 21

Dengan persamaan model regresi yang diperoleh yaitu :

$$Y = -651,050,700,061.037 + 2,352PKB + 1,011BBNKB$$

Berdasarkan Output 6 dalam persamaan regresi linier berganda, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Nilai Konstanta sebesar negatif (-) 651,050,700,061.037 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (PKB dan BBNKB) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Y adalah sebesar -651,050,700,061.037.
- Nilai Koefisien Regresi pada Variabel Pajak Kendaraan Bermotor bernilai positif (+) sebesar 2,352 maka bisa dikatakan bahwa jika variabel Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka Variabel Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 2,352.
- Nilai Koefisien Regresi pada Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bernilai positif (+) sebesar 1,011 maka bisa dikatakan bahwa jika Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka Variabel Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1,011.

a. Uji F

**Tabel 4. 9 Uji F (Simultan)**

Model	F	Sig.
1 Regression	94.384	.000 <sup>b</sup>

Sumber: Output 6 SPSS 21

Berdasarkan Output 6 diketahui bahwa nilai Sig pada uji F 0,000 dimana  $0,000 < 0,05$  maka bisa diartikan bahwa pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh simultan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis H1 diterima sehingga bisa disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2012-2021.

b. Uji T (Parsial)

**Tabel 4. 10 Uji T (Parsial)**

Model	t	Sig.
(Constant)	-.291	.779
1 PKB	12.706	.000
BBNKB	1.655	.142

Sumber: Output 6 SPSS 21

Berdasarkan Output 6 diketahui bahwa nilai Sig. Variabel PKB sebesar  $0,000 < 0,05$  maka bisa disimpulkan bahwa Variabel PKB berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Y dapat disimpulkan bahwa H2 bisa diterima. Nilai Variabel BBNKB  $0,142 > 0,05$  maka bisa disimpulkan bahwa Variabel BBNKB Tidak berpengaruh secara parsial Terhadap Variabel Y dapat disimpulkan bahwa H2 tidak diterima.

## c. Koefisien Determinan

**Tabel 4. 11 Koefisien Determinan**

Model	Adjusted R Square
1	.954

Sumber : Output 6 SPSS 21

Berdasarkan Output6 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,954 maka bisa disimpulkan bahwa adanya adanya pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD sebesar 95,4% sedangkan sisanya 4,6% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang bukan termasuk dalam penelitian.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda pada uji simultan tabel 4.9 diperoleh nilai sig. 0,000 dimana dalam penentuan keputusan menyatakan apabila jika nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Bisa disimpulkan dari analisis uji F pada tabel 4.9 bahwa nilai sig 0,00 < 0,05 yang artinya PKB dan

BBNKB berpengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2021. Dengan demikian Hipotesisi H1 bisa diterima.

Selanjutnya pada hasil pengujian tabel 4.10 dengan dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai sig.  $< 0,05$  maka terdapat pengaruh variabel X Terhadap Variabel Y. Jika nilai sig.  $> 0,05$  maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pada tabel 4.10 diperoleh hasil dengan nilai signifikansi variabel PKB sebesar  $0,000 < 0,05$  bisa disimpulkan bahwa PKB berpengaruh secara parsial terhadap PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2021. Penelitian ini juga searah pada penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih et al., 2021) yang menyatakan bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD, sehingga bisa dikatakan bahwa H2 yang menyatakan PKB berpengaruh secara parsial terhadap PAD dapat diterima. Secara rasional, apabila PKB meningkat maka PAD juga akan meningkat begitupun sebaliknya apabila PKB menurun tentu akan diikuti oleh penurunan PAD. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa PKB berpengaruh positif terhadap PAD. Hal ini juga didukung dari jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya meningkat dan tentunya setiap tahun melakukan pembayaran PKB sehingga PKB bisa menjadi penghasilan yang cukup besar yang mempengaruhi PAD.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian pada tabel 4.10 diperoleh nilai signifikansi variabel BBNKB sebesar  $0,142 > 0,05$ .

Bisa disimpulkan bahwa BBNKB tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, 2015) yang menyatakan bahwa pada penelitiannya BBNKB tidak memiliki pengaruh terhadap PAD. Sehingga H2 yang menyatakan BBNKB berpengaruh secara parsial terhadap PAD ditolak. Dari hasil penelitian menyatakan kendaraan bermotor bekas berkualitas tinggi populer di kalangan masyarakat umum karena harganya lebih murah daripada kendaraan bermotor baru. Jadi tidak heran jika saat ini ada beberapa toko yang menjual kendaraan bermotor bekas yang layak pakai. Adanya transaksi jual beli kendaraan bekas ini tentu akan mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari pemilik pertama kepada pemilik kedua. Namun biaya yang dikeluarkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor relatif mahal, pajak kendaraan motor biasanya hanya berkisar Rp 200-500 ribu dan untuk balik nama berkisar Rp 1,5 juta hal ini tentu memberatkan para wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah itu.

Untuk mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dengan adanya evaluasi mendalam terhadap kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penilaian ini bisa meliputi efektivitas kebijakan tersebut dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan dampaknya terhadap masyarakat. selain itu mengingat

biaya BBNKB yang relatif mahal, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan secara tepat waktu, dengan melakukan kampanye edukasi yang efektif tentang manfaat dan kewajiban membayar pajak kendaraan untuk mendukung pembangunan di daerah. Dan juga perlindungan bagi wajib pajak dengan penghasilan rendah, untuk wajib pajak dengan penghasilan di bawah batas tertentu, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan atau insentif tertentu, seperti pembebasan atau pengurangan biaya BBNKB. Ini akan membantu meringankan beban finansial mereka dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Selanjutnya pada hasil pengujian tabel 4.11 pada uji koefisien determinan dengan penentuan keputusan nilai Adjusted R Square sebesar 0,954 atau sebesar 95,4% yang artinya adanya pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 sebesar 95,4% dan sisanya 5,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

#### 4.2.2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat

dari data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jawa Timur Tahun 2012 – 2021 yang dihitung dalam tingkat kontribusinya (%) pada tabel 4.12 dan tabel 4.13 dibawah ini

**Tabel 4. 12 Perhitungan kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur (Triliun Rupiah)**

No .	Tahun Anggaran	Jumlah Realisasi PKB (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
1	2012	3,287,115,434,460.00	9,584,081,971,227.10	34%
2	2013	3,896,191,221,560.00	11,579,222,929,456.70	34%
3	2014	4,309,076,812,085.00	14,462,753,136,957.30	30%
4	2015	4,911,629,320,175.00	15,402,647,674,502.50	32%
5	2016	5,300,947,249,143.00	15,817,795,024,797.00	34%
6	2017	5,889,902,148,435.00	17,324,177,664,424.20	34%
7	2018	6,448,692,325,911.00	18,531,062,021,823.40	35%
8	2019	6,890,439,193,872.00	19,327,125,485,405.90	36%
9	2020	6,566,187,985,216.00	17,951,235,057,953.10	37%
10	2021	6,874,180,353,260.00	18,935,885,925,145.60	36%

Pada tabel 4.12 menunjukan bahwa tingkat kontribusi PKB terhadap PAD pada tahun 2012 mencapai 34%, pada tahun 2013 tingkat kontribusi masih sama mencapai 34%, pada tahun 2014 mengalami penurunan 30%, tahun 2015 mencapai 32%, selanjutnya pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan mencapai 34%, tahun 2017 mencapai 34%, tahun 2018 mencapai kontribusi 35%, tahun 2019 mencapai kontribusi 36%, tahun 2020



mencapai kontribusi 37% dan yang terakhir pada tahun 2021 mengalami penurunan 1% mencapai kontribusi 36%.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 menunjukan rata-rata kontribusi sebesar 34% hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PKB cukup besar terhadap PAD dan cukup dalam pembiayaan pemerintah.

**Tabel 4. 13 Perhitungan kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur (Triliun Rupiah)**

No .	Tahun Anggaran	Jumlah Realisasi BBNKB (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
1	2012	3,138,054,141,300.00	9,584,081,971,227.10	33%
2	2013	3,836,938,435,381.00	11,579,222,929,456.70	33%
3	2014	4,064,726,227,300.00	14,462,753,136,957.30	28%
4	2015	3,534,090,028,065.00	15,402,647,674,502.50	23%
5	2016	3,710,574,601,900.00	15,817,795,024,797	23%
6	2017	3,705,349,480,779.00	17,324,177,664,424.20	21%
7	2018	4,089,296,812,767.00	18,531,062,021,823.40	22%
8	2019	4,232,540,305,900.00	19,327,125,485,405.90	22%
9	2020	3,022,188,308,400.00	17,951,235,057,953.10	17%
10	2021	3,807,178,988,962.00	18,935,885,925,145.60	20%

Pada tabel 4.13 menunjukan bahwa tingkat kontribusi BBNKB terhadap PAD. Pada tahun 2012 kontribusi mencapai sebesar 33%, tahun 2013 kontribusi yang dicapai sama yaitu 33%, tahun 2014 mengalami penurunan kontribusi sebesar 28%, tahun 2015 kontribusi mencapai sebesar 23%, pada tahun 2016 - 2021 mencapai

penurunan tahun 2016 kontribusi mencapai 23%, tahun 2017 kontribusi mencapai 21%, tahun 2018 kontribusi mencapai 22%, tahun 2019 kontribusi mencapai 22%, tahun 2020 kontribusi mencapai 17% dan terakhir pada tahun 2021 kontribusi mencapai 20%.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2021 memiliki nilai rata-rata nilai kontribusi 24% hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi BBNKB cukup besar terhadap PAD dan cukup dalam pembiayaan pemerintah.

Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur pada akhirnya akan berdampak positif terhadap PAD daerah, karena sebagian besar pendapatan dari kedua jenis pajak ini masuk ke kas negara dan kemudian dibagi kembali kepada daerah sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin besar pendapatan PKB dan BBNKB, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Jawa Timur juga berdampak positif terhadap pendapatan PKB dan BBNKB. Pada tahun 2021, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Jawa Timur mencapai sekitar 23 juta unit, meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin

banyak kendaraan bermotor yang terdaftar, maka semakin banyak pula yang harus membayar PKB dan BBNKB, sehingga pendapatan dari kedua jenis pajak ini akan semakin meningkat.

Selain itu sumbangan dana PKB dan BBNKB digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan raya. Sebagian besar pendapatan dari PKB dan BBNKB digunakan untuk membiayai kegiatan perawatan dan perbaikan jalan raya, seperti pengaspalan, pengecoran, dan pembangunan jalan baru. Dana PKB dan BBNKB juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur lainnya, seperti pembangunan jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Provinsi Jawa Timur sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di daerah tersebut(DJP, 2021).

Dari hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur sangat berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pada Uji F (simultan) bernilai sebesar 94,384 dengan nilai sig. 0,000 yang dimana  $0,000 < 0,05$  yang artinya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021.
2. Pada perhitungan Uji T (parsial) variabel Pajak Kendaraan Bermotor bernilai sebesar 0,000 yang dimana dalam bentuk pengukuran uji T  $0,000 < 0,05$  artinya Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara parsial terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021, hal ini juga diikuti oleh jumlah kendaraan bermotor pada tiap tahunnya dan selanjutnya nilai variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,142 yang dimana dalam bentuk pengukuran uji T  $0,142 > 0,05$  yang artinya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 hal ini diikuti oleh besarnya biaya pengurusan balik nama. Terakhir

pada Uji Koefisien Determinan nilai *Adjusted R Square* sebesar 95,4% yang artinya adanya pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 sebesar 95,4% dan sisanya 5,6% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

3. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 mencapai nilai kontribusi 34%, nilai kontribusi ini cukup besar terhadap PAD dan juga cukup dalam pembiayaan pemerintah. Kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 mencapai nilai kontribusi 24%, nilai kontribusi ini cukup besar terhadap PAD dan juga cukup dalam pembiayaan pemerintah.

## 5.2. Saran

Berdarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dapat melakukan upaya mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan BBNKB termasuk mempertimbangkan kembali besarnya biaya pengurusan balik nama dan prosedur administratif yang terkait.
2. Bagi Samsat Provinsi Jawa Timur melakukan upaya intensifikasi pajak yang merujuk pada upaya peningkatan penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan yang melibatkan variabel – variabel lain yang relevan, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, atau faktor – faktor eksternal yang dapat mempengaruhi PAD.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). "Pembiayaan Pembangunan Daerah." Graha Ilmu.
- Adriani, P..J,A. (2005). "Pengantar Ilmu Hukum Pajak." Gramedia.
- Agustina, R. (2015). "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraanbermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012." *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 83–99.
- Algifari, G. M. (1998). "Teori Ekonomi Makro." *STIE YKPN*.
- Asri Aditya, R. I., Zulfanetti, Z., & Heriberta, H. (2021). "Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 151–166. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11822>
- BPS. (2020). "Statistik Transportasi Provinsi Jawa Timur 2016-2020."
- Damayanti, W. T., & Supramono. (2005). "Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan." Andi Ofset.
- Davey, K. . (1988). "Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga." *UI-Press*.
- Devas, N. (1989). "Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia" (M. Maris (ed.)). *UI-Press*.
- Djambula, O., Josep Bintang Kalangi, & Siwu3, H. F. D. (2019). "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara." 22(8), 49–60.
- DJP. (2021). "Data Penerimaan Pajak Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2020."

- Fatoni, A. (2011). "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi." Rineka Cipta.
- Hadi, S. (2002). "Metodologi Reserch (Edisi Revisi)." Andi Offset.
- Halim, A. (2004). "Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)." UPP AMP YKPN.
- Hastuti, P. (2018). "Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara." 1(1), 785–787.  
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Herlian, R. (2005). "Pendapatan Asli Daerah." Arifgosita.
- Islami, D., & Rahmawati, L. (2020). "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur." *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 169–179.  
<https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.169-179>
- Kansil, T. A. M., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2018). "Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 441–450.  
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21194.2018>
- Kuncoro, M. (2003). "Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi." Erlangga.
- Langen, W. J. (1975). "Asas-asas Pemungutan Pajak." Djembatan.
- LUKMAN, A. F., TAHIR, H., & MUSTARING. (2015). "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." 1–21.
- Mahmudi. (2016). "Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi ketiga)." Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu



Manajemen YKPN.

Mila, S., Utami, Y. L., & Tristiawan, F. (2021). "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 8(1), 29–43.

Ningsih, B. A., Romli, H., & Putri, A. U. (2021). "Analisis Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019." *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(1), 44–50.  
<https://doi.org/10.47747/jbme.v2i1.420>

Pantow, J. & Walewangko, E. N. (2019). "Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 8, 1–12.  
<https://doi.org/10.35794/Jpekd.22002.19.8.2018%0D>

Purnamawati, E. (2021). "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah." 19, 12–24.

Rahayu, B. (2011). "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul." 59–61.

Rakhmad Rinaldi Wahfar, A. (2014). "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pidie." *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(1), 70–79.

Smith, A. (1776). "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations." Methuen & Co. LTD.

Soemitro, R. (1990). "Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan." Eresco.

- Soemitro, R. H. (1990). "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri." Ghalia Indonesia.
- Suandy, E. (2016). "Hukum Pajak. Selemba Empat."
- Sugiyono. (2017). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Alfabeta."
- Utami, A. Y. U. T. (2014). "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pajak Daerah." [http://eprints.undip.ac.id/43779/1/09\\_UTAMI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/43779/1/09_UTAMI.pdf)
- Wahida, W., & Sorong, A. (2018). "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo." *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.35914/jemma.v1i1.77>
- Warsito. (2001). "Pendapatan Asli Daerah." PT. Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, P. A. (2018). "Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah." CV. Budi Utama. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=c1tHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pendapatan+asli+daerah&ots=BBp7ONFzKg&sig=qnNMRVf4ibimpU\\_ydTppq8fJXJAI&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=c1tHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pendapatan+asli+daerah&ots=BBp7ONFzKg&sig=qnNMRVf4ibimpU_ydTppq8fJXJAI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Yuliara, I. M. (2016). "Modul Regresi Linier Berganda." Universitas Udayana, 18.